



**PEMERINTAH ACEH**  
**KEURUKON KATIBUL WALI**  
**(Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)**  
Jln. Soekarno Hatta, Lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

# LAPORAN KINERJA (LKj)

**KEURUKON KATIBUL WALI /**  
**SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH**  
**TAHUN 2017**

**BANDA ACEH**

**2018**



## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan ridhanya kepada kita semua, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, syukur Alhamdulillah Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017, sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe atas Penggunaan Anggaran/Pengelolaan Keuangan pada SKPA. Laporan ini untuk memberikan informasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 dalam penyampaian ini diharapkan mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan kedepannya. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai Informasi, Referensi dan Bahan Evaluasi Kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Terimakasih.

Banda Aceh, Februari 2018

KATIBUL WALI

**Drs. H. SYAIBA IBRAHIM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601201 198103 1 004

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Susunan dan Tupoksi SKPD .....	2
1.4 Sumber Daya .....	9
1.5 Strategi dan Kebijakan SKPD.....	10
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi .....	19
3.3 Realisasi Anggaran .....	43
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
<b>Lampiran : 1. Daftar Pengukuran Capaian Kinerja SKPA...</b>	
<b>2. Fotocopi Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2017 di tandatangani Gubernur .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

**P**enyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj juga dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Laporan Lkj merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya atau pemberi wewenang sebagaimana di amanatkan. Laporan Lkj merupakan bentuk akuntabilitas dari Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe atas penggunaan anggaran pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 yang telah di tetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2017.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini disusun untuk memberikan informasi kinerja SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe kepada Gubernur Aceh atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017.

## **1.3 Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD**

Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh merupakan Lembaga Struktural Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan akan dilakukan perubahan Struktural Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 16 Nopember 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah unsur pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe dalam urusan pemerintahan, baik urusan pilihan maupun urusan wajib bidang kebudayaan, bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, mengelola keuangan dan mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan Majelis Fungsional serta tugas- tugas lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe yang dilayani Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe, terdiri dari :

### **1. Wali Nanggroe Aceh;**

Wali Nanggroe Aceh telah dilakukan pengukuhan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 16 Desember 2013 atas nama Paduka Yang Mulia **TEUNGKU H. MALIK MAHMUD AL - HAYTHAR**

## **2. Waliyul'Ahdi;**

Waliyul' Ahdi yang telah dilakukan pengukuhan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh dengan Surat Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Nomor 189.1/39/2016 tentang Pengangkatan dan Penetapan Waliyul' Ahdi Lembaga Wali Nanggroe tanggal 19 Desember 2016 atas nama **Tgk. H. T. M. NAZAR** dengan masa bakti Tahun 2016 s.d 2021.

Namun demikian atas beberapa pertimbangan maka posisi Waliyul'Ahdi terhitung 1 Februari 2018 diberhentikan sementara sesuai dengan keputusan Wali Nanggroe No. 189.1/001/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Pemberhentian Sementara Waliyul'Ahdi.

## **3. Majelis Tinggi;**

Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe meliputi ;

- 3.1. Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe Aceh terdiri dari 7 anggota yang telah dilakukan Pengukuhan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe dengan Surat Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Nomor 189.1/02/2016 pada tanggal 13 Agustus 2016 bertempat di Mesjid Raya Baiturrahman.
- 3.2. Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe Aceh merupakan anggota unsur ulama mewakili masing-masing 1 orang dari 23 kabupaten/ kota yang telah dilakukan pengukuhan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe dengan Surat Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nomor 189.1/32/2016 tanggal 31Oktober 2016.
- 3.3. Majelis Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe Aceh merupakan anggota yang berasal dari unsur imum mukim mewakili kabupaten/kota, masing-masing daerah diwakili oleh 2 (dua) orang imum mukim. anggota Majelis Tuha Lapan dari 23 kabupaten/kota berjumlah 46 anggota. Tahun 2016 yang telah dilakukan pengukuhan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe dengan Surat Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Nomor 189.1/33/2016 pada tanggal 31Oktober 2016 bertempat di Pendopo Komplek Lembaga Wali Nanggroe sejumlah 43 anggota, sisa 3 anggota lagi akan dilakukan pengukuhan tahun 2017 namun tidak dapat terlaksana.

#### **4. Majelis Fungsional ;**

Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe meliputi ;

Majelis Fungsional yang telah terbentuk dalam majelis Keistimewaan Aceh dengan sekretariatnya sendiri terdiri dari 4 (empat) Majelis yaitu MPU, MAA, MPD dan Baitul Mal. Sedangkan 7 (tujuh) Majelis merupakan Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017.

Adapun Majelis Fungsional yang sudah dilakukan pengukuhan pada Tahun 2016, terdiri dari :

- 4.1. Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, merupakan 7 (tujuh) anggota majelis dari unsur dokter-dokter spesialis dan Apoteker yang telah dilakukan pengukuhan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe dengan Surat Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nomor 189.1/41/2016 tanggal 19 Desember 2016.
- 4.2. Majelis Perempuan, merupakan 7 (tujuh) anggota majelis dari tokoh-tokoh perempuan Aceh yang telah dilakukan pengukuhan oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe dengan Surat Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nomor 189.1/40/2016 tanggal 19 Desember 2016.

Sedangkan 4 (empat) Majelis yang merupakan Target Kinerja Tahun 2017 yang proses pemilihan/penyeleksian serta pengukuhan telah tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPA Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun Anggaran 2017, terdiri dari (1) Majelis Ekonomi, (2) Majelis Hutan Aceh, (3) Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, (4) Majelis Pertambangan dan Energi serta (5) Bentara, belum dapat terlaksana.

Tujuan adanya Lembaga Wali Nanggroe Aceh, diharapkan dapat terciptanya Pelayanan pada masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka mencapai tujuan terbentuknya lembaga, adapun tujuan tersebut meliputi :

- a. Mempersatukan rakyat Aceh;
- b. Meningkatkan dinul islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;

- c. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah dan tamadun Aceh; dan
- d. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe ;
- b. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe
- c. Mempersiapkan Tenaga Ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional
- d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe

Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, mempunyai Fungsi yaitu ;

- a. Pelaksanaan pelayanan administrative terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional
- d. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'Ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

Dalam Penyelenggaraan Fungsi Keurukon Katibul Wali, mempunyai Kewenangan, sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan administrative terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. Melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. Menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;



- d. Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persindangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'Ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Katibul Wali/Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas sebagai berikut ;

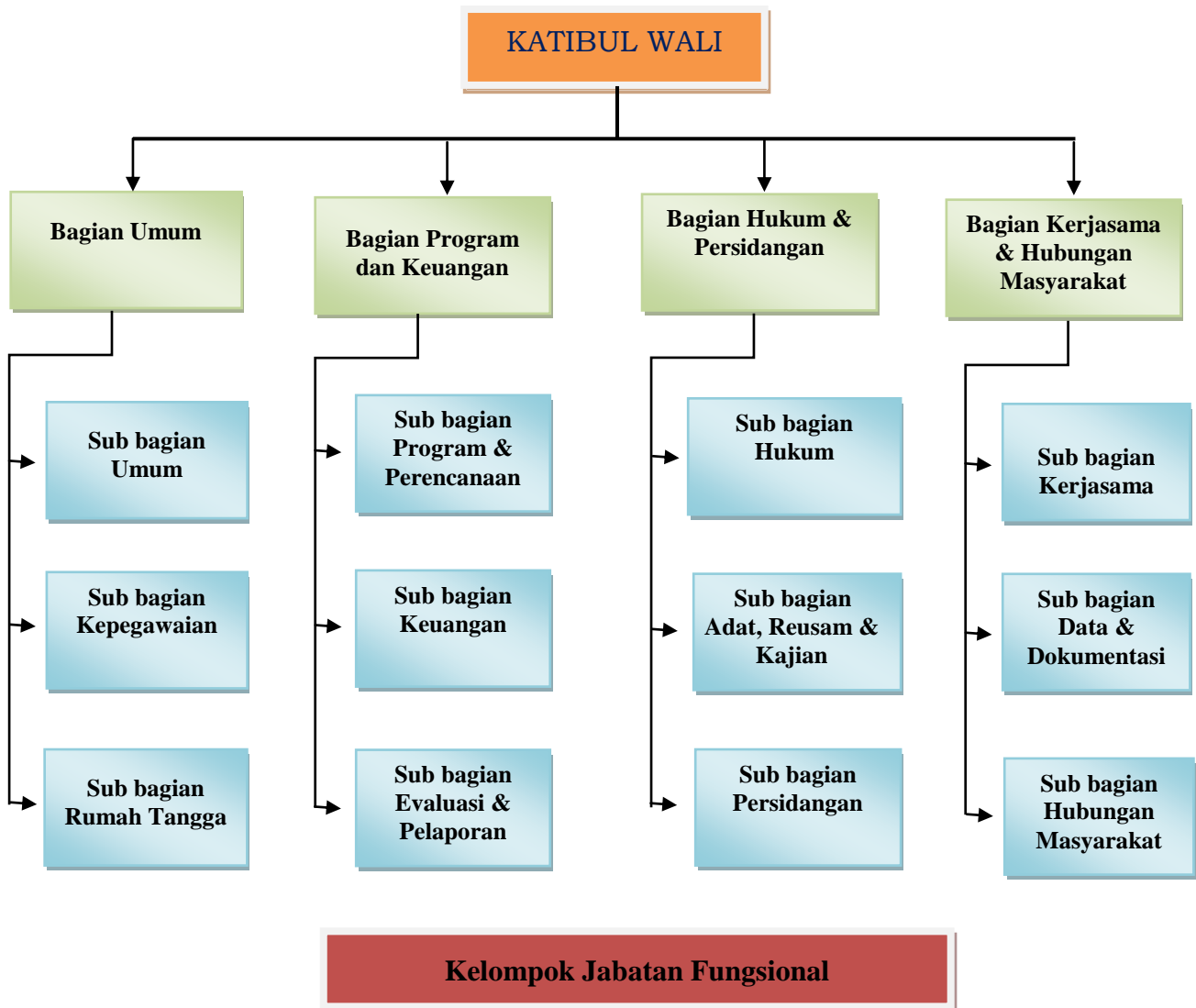
- a. Penyelenggaraan administrasi Katibul Wali/Kelembagaan Wali Nanggroe meliputi Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Persindangan, Bagian Perencanaan Program, Sistem Informasi dan Kerjasama;
- b. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis Kelembagaan Wali Nanggroe;
- c. Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis-Majelis dalam rangka mendukung perberdayaan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- d. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- e. Pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi Kelembagaan Wali Nanggroe baik langsung maupun laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative pemecahannya;
- f. Menyiapkan dan memfasilitasi produk hukum dan perundang undangan, pengkajian adat dan reusam serta penyiapan persidangan dan pendokumentasian sebagai bahan sosialisasi Kelembagaan Wali Nanggroe;
- g. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyediaan system informasi;
- h. Penyebaran informasi, sosialisasi dan publikasi kegiatan Gubernur serta kegiatan Kelembagaan Wali Nanggroe; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Nanggroe, Waliyul ahdi dan/atau Gubernur melalui Sekda sesuai dengan tugasnya;

Keurukon Katibul Wali/ Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe membawahi :

1. Bagian Umum, terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum;
  - b. Sub bagian Kepegawaian;dan
  - c. Sub bagian Rumah Tangga;
2. Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari :
  - a. Sub bagian Program dan Perencanaan;
  - b. Sub bagian Keuangan;dan
  - c. Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Hukun dan Persidangan, terdiri dari :
  - a. Sub bagian Hukum;
  - b. Sub bagian Adat, Reusam dan Kajian;dan
  - c. Sub bagian Persidangan;
4. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian Kerjasama
  - b. Sub bagian Data dan Dokumentasi;dan
  - c. Sub bagian Hubungan Masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut:

Gambar 1 – Struktur Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali



## 1.4 Sumber Daya

Sumber daya aparatur Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagai SKPA terbentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87), Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe, saat ini telah memiliki Sumber Daya Manusia, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Komposisi Personalia Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe

No	Uraian	Jml	Jenis Kelamin		Golongan Ruang			Pendidikan			
			L	P	II	III	IV	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Sekretariat	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
2	Kepala Bagian	3*	3	-	-	-	3	-	-	2	1
3	Kepala Sub Bagian	12	10	2	-	8	4	-	-	6	6
4	Staf	21	14	7	3	17	1	3	1	16	1
Jumlah		37	28	9	3	25	9	3	1	25	8

Ket : -\* Kabag Umum kosong (TMT 01 November 2017 s.d sekarang)

Berdasarkan uraian table 1.1. di atas dari segi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe masih sangat-sangat kurang, namun dari tingkat pendidikan telah memadai. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Keurukon Katibul Wali didalam melaksanakan kegiatan sehingga terpenuhi capaian kinerja, dipandang perlu penambahan aparatur fungsional umum (staf) yang memadai.

Sedangkan fasilitas infrastruktur Sarana dan Prasarana kerja sebagian telah dimiliki Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh telah memadai dengan penempatan Gedung Baru sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor 011/9780 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penggunaan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe serta Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 024/244/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Aceh Berupa Bangunan pada Sekretariat Keurukon Katibul Wali, maka pada tanggal 15 Juli 2016, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Resmi telah menempati gedung Komplek Lembaga Wali Nanggroe di Jln. Soekarno Hatta Gampong Lamblang Manyang, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

### **1.5 Strategi dan Kebijakan SKPD**

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai unsur pemberi dukungan administrasi dan pelayanan kepada Lembaga Wali Nanggroe dalam urusan Pemerintahan non urusan dan urusan wajib bidang Kebudayaan guna terselenggarakan tugas dan fungsinya untuk terwujudnya tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe.

Untuk mencapai sasaran dari tujuan terbentuknya Keurukon Katibul Wali dalam rangka melayani kebutuhan baik sarana maupun prasarana Lembaga Wali Nanggroe, ada beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

- a. Peningkatan tertip administrasi kegiatan;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- d. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- e. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe;
- f. Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam penggunaan seragam dinas;
- g. Pengembangan system pengendalian dan pelaporan;
- h. Peningkatan pemberian apresiasi kepada yang berjasa memajukan peradaban Aceh;
- i. Peningkatan pembinaan keanekaragaman budaya/adat istiadat
- j. Peningkatan data dan informasi serta pendokumentasikan naskah kuno;

- k. Peningkatan peraturan ketatalaksanaan kelembagaan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai Islam;
- l. Peningkatan pembinaan dan pelestarian serta pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang Islam;
- m. Pergeseran fungsi kebudayaan dari tontonan menjadi tuntunan.
- n. Peningkatan dukungan penyediaan data/informasi di bidang kebudayaan dan program.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut juga disusun kebijakan operasional untuk menunjang program dan kegiatan Keurukon Katibul Wali adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan administrasi dan pelayanan yang memenuhi azas akuntabilitas;
- b. Penerapan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
- c. Penyediaan data dan informasi yang akurat dengan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat diakses dengan mudah;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatannya;
- e. Penyediaan dan penempatan sumber daya aparatur yang berkualitas;
- f. Penugasan aparatur mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan;
- g. Internalisasi nilai-nilai integritas pada setiap aparatur melalui penugasan ikut serta diklat pembentukan karakter;
- h. Penyediaan dan penempatan sumber daya aparatur memenuhi ketentuan yang berlaku menurut kebutuhan Kelembagaan Wali Nanggroe;
- i. Penerapan kedisiplinan aparatur dalam penggunaan seragam dinas sesuai ketentuan;
- j. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan secara intensif, efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Pemberian apresiasi kepada yang berjasa secara selektif, adil dan transparan;
- l. Pembinaan keanekaragaman budaya/adat dan istiadat Islami yang berkelanjutan.
- m. Penyediaan data dan informasi serta pendokumentasian naskah kuno (manuskrip) sesuai kebutuhan.
- n. Penetapan peraturan ketatalaksanaan kelembagaan dan adat istiadat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kearifan lokal dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dinul islam;

- o. Pembinaan dan pelestarian serta pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang dapat mewujudkan nilai-nilai luhur budaya yang islami;
- p. Penyebarluasan nilai-nilai luhur dapat menjadi tuntunan dengan memperhatikan momentum.
- q. Pelaksanaan dukungan penyediaan data/informasi di bidang kebudayaan dan program sesuai ketentuan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Untuk menentukan kegiatan yang akan menjadi prioritas perlu dilakukan perencanaan didalam menyusun apa yang akan kita kerjakan/lakukan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja. Perencanaan merupakan proses-peroses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan, kemudian baru diikuti dengan apa yang akan kita kerjakan/lakukan untuk mencapainya. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan target kinerja tahunan berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Setiap perencanaan harus mempunyai peta perjalanan (*Road Map*), melalui berapa tahapan dan sampai dimana tujuan akhirnya, artinya: Perencanaan harus jelas tujuannya (100%-nya nanti seperti apa) dan jelas pentahapannya (dari 0%, keberapa%, sampai 100%, sehingga bisa dievaluasi tercapai berapa% dan masihberapa% lagi).

Terdapat 4 sifat yang harus dibedakan dalam perencanaan:

- 1) Yang sifatnya pembangunan
- 2) Yang sifatnya peningkatan/pengembangan
- 3) Yang sifatnya mempertahankan apa yang telah dibangun - (pemeliharaan)
- 4) Yang sifatnya mengoperasionalkan yang telah dibangun/rutinitas yang wajib dilakukan - (operasional).

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman petunjuk teknis perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja dan tatacara review atas laporan akuntabilitas instansi pemerintah, SKPD diamanatkan menyusun perjanjian kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja dimaksud adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang di sertai dengan indikator kinerja.



Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (**outcome**) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup **outcome** yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Keurukon KatibulWali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun 2017 berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPA Keurukon KatibulWali/Sekretariat Lembaga WaliNanggroe tahun 2017.

Adapun yang termuat dalam perjanjian kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun 2017 sebagai berikut :

- 1) Pernyataan perjanjian kinerja Katibul Wali selaku pengemban tugas dengan Gubernur Aceh selaku atasannya, sebagaimana lembar/perjanjian kinerja terlampir.
- 2) Formulir perjanjian kinerja meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran program.

Sasaran strategis Keurukon Katibul Wali tahun 2017 yang di tetapkan dalam perjanjian terdapat 2 (dua) program utama yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, dengan anggaran program sebesarRp. 1.983.813.000.-tidak dapat terealisasi secara keseluruhan dikarenakan adanya pergantian/mutasi jabatan Katibul Wali serta perubahan anggaran program dan kegiatan pada DPA-SKPA Keurukon Katibul Wali TA. 2017.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe T.A. 2017 dapat dilihat pada table 2.1 serta Revisi/Pergeseran dapat dilihat padaTabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja (Sebelum Revisi/Pergeseran) Keurukon Katibul Wali TA. 2017.

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	1.1. Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe : a. Majelis Hutan Aceh (MHA) b. Majelis Kahazanah dan Kekayaan Aceh(MKKA) c. Majelis Pertambangan dan Energi Aceh (MPEA) d. Majelis Ekonomi	26,7 % 7 Orang 7 Orang 33 Orang
2	Meningkatnya jumlah naskah/manuskrip kuno terselamatkan/lestari dan terdokumentasikan padaLembaga Wali Nanggroe	2.1. Jumlah naskah/manuskrip kuno yang di alih bahasa dari 16 naskah yang dipreservasi 2.2. Jumlah naskah/manuskrip kuno/Khazanah Aceh yang di selamatkan dipreservasi	4 naskah (312 lembar) 10 naskah
3	Meningkatnya jumlah Reusam mengatur tatalaksanaan Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam	3.1. Jumlah Reusam ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe 3.2. Jumlah Rekomendasi/pertimbangan Wali Nanggroe	4 Reusam 7 Rekomendasi/pertimbangan
4	Meningkatnya pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/ kelembagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi/publikasi.	3.1. JumlahAktualisasinilai-nilai adat dan adat istiadat melalui media cetadanelektronik. a. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/online. b. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)	7 kali 45 kali

Tabel 2.2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja (Setelah Revisi/Pergeseran) Keurukon Katibul Wali TA. 2017.

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	1.2. Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe : e. Majelis Hutan Aceh (MHA) f. Majelis Kahazanah dan Kekayaan Aceh(MKKA) g. Majelis Pertambangan dan Energi Aceh (MPEA) h. Majelis Ekonomi		26,7 %  7 Orang 7 Orang   33 Orang	
2	Meningkatnya jumlah naskah/manuskrip kuno terselamatkan / lestari dan terdokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe	2.1. Jumlah naskah/manuskrip kuno yang di alih bahasa dari 16 naskah yang dipreservasi 2.2. Jumlah naskah/manuskrip kuno/Khazanah Aceh yang di selamatkan dipreservasi		4 naskah (312 lembar) 10 naskah	
3	Meningkatnya jumlah Reusam mengatur tatalaksanan Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam	3.1. Jumlah Reusam ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe 3.2. Jumlah Rekomendasi/per- timbangan Wali Nanggroe		4 Reusam  7 Reko- mendasi/per timbangan	
4	Meningkatnya pengetahuan/ pemahaman masyarakat tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/ kelem-bagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi/publikasi.	3.2. Jumlah Aktualisasi nilai-nilai adat dan adat istiadat melalui media cetadanelektronik. c. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/online. d. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)		7 kali  45 kali	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Fokus utama dari pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan seperti Lembaga Wali Nanggroe ini telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe ini untuk membangun akuntabilitas kinerja, pengembangan pelayanan public adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh/instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran Pemerintah Aceh. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja).

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe atas setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan

sasaran yang tercantum dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun anggaran 2017 dalam mewujudkan target kinerja sebagaimana dilaporkan dalam laporan kinerja ini melaksanakan 2 (dua) program utama guna mendukung tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe. Hasil pengukuran kinerja atas target kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2017.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	1.3. Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe : i. Majelis Hutan Aceh (MHA) j. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh(MKKA) k. Majelis Pertambangan dan Energi Aceh (MPEA) l. Majelis Ekonomi		26,7 %  7 Orang 7 Orang  33 Orang	- - -
2	Meningkatnya jumlah naskah/manuskrip kuno terselamatkan / lestari dan terdokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe	2.1. Jumlah naskah/manuskrip kuno yang dialih bahasa dari 16 naskah yang dipreservasi 2.2. Jumlah naskah/manuskrip kuno/ Khazanah Aceh yang di selamatkan dipreservasi		4 naskah (312 lembar)  10 naskah	1 naskah (284 lbr) -
3	Meningkatnya jumlah Reusam mengatur tatalaksanan Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam	3.1. Jumlah Reusam ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe 3.2. Jumlah Rekomendasi/pertimbangan Wali Nanggroe		4 Reusam  7 Rekomendasi/pertimbangan	- -
4	Meningkatnya pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/ kelembagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi/publikasi.	3.3. Jumlah Aktualisasinilai-nilai adat dan adat istiadat melalui media cetadanelektronik. e. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/online. f. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)		7 kali  45 kali	7 kali  30 kali

Dari uraian Tabel 3.1 di atas, tergambar bahwa dari 9 indikator kinerja tersebut secara umum berhasil dicapai 2 target, 6 indikator kinerja tidak mencapai target, sedangkan 1 indikator kinerja kurang dari target. Pengukuran kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe tahun 2017 dilakukan setiap bulan dan pengendaliannya menggunakan format kendali kinerja sebagaimana terlampir.

### 3.2. Analisa Capaian Kinerja Organisasi

#### 3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Wali Nanggroe.

##### 1.1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 3 indikator kinerja yaitu : Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe, indikator kinerja tersebut pada Perjanjian Kinerja awal disesuaikan dengan Anggaran yang tersedia. Tahun 2017 ditargetkan untuk pengisian/pengukuhan 4 (empat) Majelis Tinggi yaitu; (1) Majelis Hutan Aceh (MHA), (2) Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh (MKKA), (3) Majelis Pertambangan dan Energi Aceh (MPEA) dan Majelis Ekonomi, dengan target atau capaian masing-masing Majelis Tinggi dan persentase rata-rata tingkat capaian dari target tersebut 100 %. Pencapaian target kinerja tersebut ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1. Realisasi/Pencapaian Sasaran Strategis 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	1.4. Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe : m. Majelis Hutan Aceh (MHA) n. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh (MKKA) o. Majelis Pertambangan dan Energi Aceh (MPEA) p. Majelis Ekonomi		26,7 %  7 Orang 7 Orang  33 Orang	Tidak tercapai

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe telah menandatangani perjanjian kerja untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Wali Nanggroe didalam pemenuhan struktur Kelembagaan Wali Nanggroe, namun pengisian Majelis Tinggi tersebut tidak dapat terlaksana sesuai dengan target kinerja, hal ini terjadi karena Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang telah dikukuhkan pada tahun 2016 belum mendapat legalitas dari pemerintah Aceh, sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan Kelembagaan Wali Nanggroe tidak dapat dilaksanakan karena berkaitan erat dengan penggunaan anggaran sebagai dasar dilakukannya pembayaran hak-hak personil majelis sesuai dengan Pergub 41 tentang Biaya Lembaga Wali Nanggroe. Dengan tidak adanya legalitas dari Pemerintah Aceh, praktis seluruh rencana kinerja yang berhubungan dengan Lembaga Wali Nanggroe menjadi terhenti.

Sedangkan untuk Tuha Peut baru dapat melaksanakan kegiatan untuk memilih/menambah keanggotaan Tuha Peut pada bulan Oktober 2017 setelah mendapat legalitas berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 841/1031/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pelaksana Tugas Pimpinan dan Anggota Majelis Tuha Peut Lembaga Wali Nanggroe.

## **1.2) Perbandingan Antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe pada tahun 2016 Waliyul Ahdi, Majelis Tinggi merupakan pengukuhan yang pertama dilaksanakan oleh Wali Nanggroe Aceh, sedangkan target pemenuhan struktur kelembagaan pada tahun 2017 yaitu (1) Majelis Hutan Aceh (MHA), (2) Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh (MKKA), (3) Majelis Pertambangan dan Energi Aceh (MPEA) dan Majelis Ekonomi tidak dapat terealisasi sebagaimana mestinya dikarenakan Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang telah dikukuhkan pada tahun 2016 belum mendapat legalitas dari pemerintah Aceh. Sebagai realisasi/capaian kinerja yang telah di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dari sasaran Tahun 2017 belum terlaksana sebagaimana target kinerja pada Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali Tahun 2012-2017.

Tabel 3.2.1.2. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Beberapa Tahun Sebelumnya.

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah lembaga adat mendapat penghargaan Wali Nanggroe	3(tiga) lembaga adat	3(tiga) lembaga adat				
Jumlah komunitas adat mendapat penghargaan Wali Nanggroe	3 (tiga) komunitas adat	3 (tiga) komunitas adat				
Jumlah tokoh adat mendapat penghargaan Wali Nanggroe	3 (tiga) tokoh adat	3 (tiga) tokoh adat				
Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe :			1. Majelis Tuha peut 2. Majelis Tuha Lapan	1. Waliyul Ahdi 2. Majelis Tuha Peut 3. Majelis Fatwa 4. Majelis Tuha Lapan 5. Melejis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan 6. Majelis Perempuan	1. Majelis Hutan Aceh 2. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh 3. Majelis Pertambangan dan Energi Aceh 4. Majelis Ekonomi	- - - -

### 1.3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan terger jangka menengah.

Dengan tidak adanya legalitas Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang telah dikukuhkan pada tahun 2016 dari pemerintah Aceh, maka realisasi Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe dalam tahun 2017 ini tidak dapat terlaksana.

Adapun tabulasi perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.3. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja dengan Renstra

Indikator Kinerja	2014		s.d 2015		2017		Target Renstra	
	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Target	Realis asi	s.d 2017	Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah lembaga adat mendapat penghargaan Wali Nanggroe	-	-	3	33%			3	9
Jumlah komunitas adat mendapat penghargaan Wali Nanggroe	-	-	3	33%			3	9



Jumlah tokoh adat mendapat penghargaan Wali Nanggroe	-	-	3	33%			3	9
Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe					1. Majelis Hutan Aceh 2. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh 3. Majelis Pertambangan dan Energi Aceh 4. Majelis Ekonomi	0 %	100%	100 %

#### 1.4) Program /Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Adapun Program dan kegiatan penunjang untuk dapat terwujudnya realisasi/pencapaian kinerja dari sasaran strategis ini, yaitu program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan.

### 3.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan jumlah naskah/manuskrip kuno terselamatkan/lestari dan terdokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe

#### 1.1) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 indikator kinerja yaitu jumlah naskah/manuskrip kuno yang di Alih Bahasa/Aksara, dengan target kinerja tahun 2017 ditetapkan 2 naskah yang dialih bahasakan dari Arab Melayu ke dalam bahasa Indonesia, namun dalam pelaksanaannya hanya 1 naskah



yang dapat terealisasi dengan judul naskah ; At-Tuhaf al-Muharrarah li-kulli Afazi Matani al-Jauharati al-Munawwarati.

Naskah yang dialih bahasakan ini dimaksud adalah agar masyarakat dapat memahami isi naskah kuno serta naskah tersebut dapat dijadikan dokumentasi pada Lembaga Wali Nanggroe. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut dapat dicapai 50%. Pencapaian target kinerja tersebut ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.1. Realisasikan/Pencapaian Sasaran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4
Jumlah naskah yang di Alih Bahasa/Aksara manuskrip/Naskah kuno	4 naskah (312 lbr)	1 naskah (284 lbr)	18,75 %

Tahun 2015 jumlah 16 Manuskrip/Naskah kuno yang telah di Preservasikan dan didokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe, Tahun 2016 yang dapat di Alih Bahasa/Aksara dalam bahasa Aceh 2 Naskah sesuai dengan dana tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Keurukon Katibul Wali sedangkan pada tahun 2017 dapat terealisasi 1 naskah untuk alih bahasa.

Tabel 3.2.2.2. Jumlah Manuskrip/Naskah Kuno yang Terdokumentasi pada Lembaga Wali Nanggroe tahun 2017 dan di Alih Bahasa/Aksara Tahun 2017

No	Judul Naskah/ Teks	Bahasa	Ringkasan Naskah	Alih Bahasa/ Aksara Tahun 2016
1	2	3	4	5
1	Al-Murabba'fi Hukum Mazahib al- Arba'ah	Arab-Melayu	Bahasan tentang fikih, dengan perbandingan empat mazhab di antara topic yang dibahas adalah mengenai nikah, shalat jumat, persoalan jenazah	
2	Kumpulan teks Tuhfah Mursalah Doa	Arab,- Melayu	Kumpulan teks tentang wujud Allah, martabat tujuh, sifat yang wajib, jaiz dan mustahil bagi Allah	
3	Tarekat Haddadiyah	Melayu	doa dalam tarekat Haddadiyah	
4	Hikayat Bahasa Aceh	Aceh	Nasehat-nasehat dalam kehidupan	
5	Syair Haddad	Melayu	Syair tentang puj-pujian kepada Allah, doa sebelum membaca Al-Quran	
6	Ushuluddin, Risalah Maulana Khatib Muda	Melayu	Teks 1 : Membahas tentang iktikad yang wajib ada pada seorang mukllaf, makrifat, iman, iskam; Teks 2 : tentang makrifat(tauhid, iman, islam) dan sifat –sifat Allah SWT; Teks 3 : Kutipan dari kitab Ihya Ulum al- Din; Teks 4 : Kumpulan beberapa hadis qudsi tentang persoalan keimanan	
7	Hikayat laut Makrifat	Aceh	Tauhid yang disalin dalam bentuk hikayat dan tentang ta'bir mimpi.	
8	Hikayat Aceh	Aceh	Hikayat Nabi Adam, tentang tauhid dan sifat-sifat Allah	
9	Hikayat Aceh	Aceh	Hikayat tentang agama, salawat kepada nabi, sifat-sifat Allah dari segi tawauf	Hikayat Fatimah
10	Hadist 40 dan kitab Luhab	Arab	Pengajaran, anjuran, etika	

11	Hikayat Muda Bahlia	Aceh	-	
12	Kumpulan Teks	Arab Melayu Aceh	Doa kebal, surah yasin, syair bahasa aceh, doa sarang anak bedil dan obat-obatan	
13	Hikayat prang sabi	Aceh	Hikayat prang sabi karya Tgk Syik Pante Kulu atas permintaan Tgl Syi Di Tiro untuk membangkitkan semangat rakyat Aceh dalam peperangan melawan Belanda.	Hikayat Aulia Tujoh

No	Judul Naskah/ Teks	Bahasa	Ringkasan Naskah	Alih Bahasa/ Aksara Tahun 2016
1	2	3	4	5
15	Sidang Fakir Tajwid Mad	Arab	Syair siding Fakir Hamzah fansuri dan Tajwid Mad membahas tentang criteria mad dalam bacaan Al- Quran	
16	Tuhfah Al- Muharrar Kullu Alfaz Matan Al-Jauharah Al-Munawwarah	Arab	Interpretasi setiap kata dari sumber kitab permata yang terang	Tuahid

### 1.2) Perbandingan antara Realisasi/capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Manuskrip/Naskah Kuno yang Didokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe yang ditargetkan 16 manuskrip pada tahun anggaran 2015 dan merupakan target tahun pertama dalam Rencana Strategis Keurukon Katibul Wali 2012-2017 dan dapat di realisasikan 16 manuskrip atau capaiannya 100 %, pada tahun 2017 tidak ditargetkan pengantian/ganti rugi Naskah Kuno, hanya yang menjadi target Alih Bahasa/Aksara.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.3. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Beberapa Tahun yang Lalu

Indikator Kinerja	2014		2015		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Naskah/manuskrip kuno yang di preservasi	-	-	16 Naskah	16 Naskah	-	-
Jumlah naskah yang di Alih Bahasa/Aksara manuskrip/ Naskah kuno					4 Naskah	1 Naskah

### 1.3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Inidengan Target Jangka Menengah

Realisasi dari target kinerja pada sasaran strategis ini yaitu jumlah Naskah Manuskrip Kuno yang di preservasikan sampai tahun 2017 adalah 16 manuskrip atau capaiannya 100%, dengan tingkat capaiannya 33.3 % dari target kinerja akhir renstra yaitu 48 manuskrip.

Realisasi dari target kinerja pada sasaran strategis yaitu jumlah Naskah yang di Alih Bahasa/Aksara Manuskrip/Naskah Kuno sampai Tahun 2017 hanya 3 naskah dari 16 naskah yang sudah ada, disebabkan karena terbatasnya Anggaran yang tersedia pada SKPA Keurukon Katibul Wali. adapun tabulasi perbandingan tingkat capaian kinerja dengan renstra sbb :

Tabel 3.2.2.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Renstra

Indikator Kinerja	2014		2015		2016		s.d 2017		Target Renstra	
	Target	Reali sasi	Target	Reali sasi	Target	Thd akhir Renstra	Target	Reali sasi	Target s.d 2017	Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah Naskah/manuskrip kuno yang di preservasi	-	-	16	16	16	33%			16	16
Jumlah naskah yang di Alih Bahasa/Aksara manuskrip/ Naskah kuno					3 naskah	2 Naskah	4 naskah	1 naskah	7 Naskah	7 Naskah

### 1.4) Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Penggunaan Sumberdaya

Capainya sasaran kinerja ini tidak terlepas dari tersedianya anggaran untuk melihat manuskrip yang dikoleksi oleh masyarakat dengan melakukan survey keberadaan manuskrip tersebut, pelaksanaannya survey dilakukan aparatur Keurukon Katibul Wali dan melibatkan para ahli kodilog dan filolog. Sedangkan pada Tahun 2017 dari 16 Naskah kuno tersebut hanya dapat 1 naskah yang dialih bahasa/aksara dikarenakan terbatasnya anggaran Keurukon Katibul Wali.

### 1.5) Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan penunjang terwujudnya realisasi /pancapaian kinerja dari sasaran strategis 2 ini, yaitu program pengembangan nilai budaya dan kegiatan survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno.

**3.2.3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya jumlah Reusam mengatur tatalaksanaan Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam**

**1.1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Pencapaian Sasaran Strategis 3 ini di ukur melalui kinerja yaitu : terpenuhinya Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe untuk melengkapi struktur Majelis Tinggi. Dengan tidak adanya legalitas dari pemerintah Aceh tentang Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang telah dikukuhkan pada tahun 2016, menimbulkan dampak tidak dapat terlaksananya kegiatan yang telah diprogramkan sesuai dengan perjanjian kerja.

Dengan demikian persentase rata-rata tingkat capaian sasaran strategis 3 ini tidak dapat dicapai. Adapun target kinerja sasaran strategis 3 ini di tabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.1. Realisasi /Pencapaian Sasaran Strategis 3 Perjanjian Kinerja tahun 2017

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4
Jumlah Reusam ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe	4 Reusam	-	0 %
Jumlah Rekomendasi/ pertimbangan Wali Nanggroe	7 Rekomendasi/ pertimbangan	-	0 %
Persentase rata-rata tingkat capaian			0 %

**3.2.4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pengetahuan/pemahaman masyarakat dan aparatur Negara tentang kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/ kelembagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai dinul islam melalui kegiatan pelatihan/ sosialisasi/ publikasi/aktualisasi nilai-nilai luhur.**

## 1.2) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pencapaian Sasaran Strategis 4 ini di ukur melalui 2 indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/online, 2) Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho).

Sedangkan Tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa, baik media cetak (Koran/tabloid local) maupun elektronik (radio/tv) di targetkan 7 tayangan dengan realisasinya 7 tayangan atau tingkat capaian 100%, sedangkan tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media cetak/baliho di targetkan 45 tayangan dengan realisasinya 30 tayangan atau tingkat capaian 67%.

Dengan demikian persentase rata-rata tingkat capaian sasaran strategis 4 ini sebesar 83,5 %. Adapun pencapaian target kinerja sasaran strategis 4 ini di tabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.1. Realisasi /Pencapaian Sasaran Strategis 4 Perjanjian Kinerja tahun 2017

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/online	7 tayangan	7 tayangan	100 %
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)	45 tayangan	30 tayangan	67 %
Persentase rata-rata tingkat capaian			83,5 %

## 1.3) Perbandingan Antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu

Selanjutnya, tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa tahun 2017 terealisasikan sebanyak 7 tayangan, dibandingkan realisasi tahun 2016 hanya 5 tayangan, sedangkan tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media cetak/baliho sebanyak 30 tayangan, dibandingkan realisasi tahun 2016 hanya 31 tayangan. Perbandingan Jumlah target kinerja untuk publikasi melalui media elektronik dan media cetak pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah tayangan kepada masyarakat jika dibandingkan dengan jumlah tayangan tahun 2016, hal ini tidak terlepas dari jumlah Anggaran yang ada

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.

Adapun perbandingan tingkat capaian kinerja sasaran strategis 4 pada tahun sebelumnya sbb :

Tabel 3.2.3.2. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Beberapa Tahun yang Lalu dengan Tahun 2017.

Indikator Kinerja	2015		2016		2017	
	Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	4	4	4	5	6	7
Persentase imum mukim mendapatkan pelatihan /sosialisasi LWN	27 %	27 %				
Jumlah Aparatur Negara mendapatkan sosialisasi LWN	60 aparat ur	60 aparat ur				
Jumlah oplah tabloid Wali Nanggroe memuat tentang kegiatan Lembaga Wali Nanggroe di edarkan dalam masyarakat	88.000 Oplah	88.000 Oplah				
Jumlah majalah Wali Nanggroe memuat tentang pembangunan kebudayaan Aceh diedarkan dalam masyarakat	4.800 buah	4.800 buah				
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/ online	20 kali tayang an	20 kali tayangan	5 kali tayangan	5 kali tayangan	7 kali tayangan	7 kali tayangan
Jumlah tayangan publikasi himba uan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)	2015	2015	25 kali tayangan	31 kali tayangan	45 kali tayangan	30 kali tayangan

#### 1.4) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa sampai tahun 2017 berjumlah 7 tayangan atau tercapai 100 % dari target kinerja yang direncanakan sampai tahun 2017 yaitu 7 tayangan. Sedangkan capaian kinerja sampai tahun 2017 sebesar 100, % dari target kinerja akhir Renstra yaitu 75 tayangan.

Sedangkan publikasi himbauan / ajakan Wali Nanggroe melalui media cetak/baliho sampai tahun 2017 berjumlah 190 tayangan atau tercapai 100 % dari target kinerja yang direncanakan sampai tahun 2017 yaitu 190 tayangan. Sedangkan capaian kinerja sampai tahun 2017 sebesar 72 % dari target kinerja akhir Renstra yaitu 190 tayangan.

Adapun tabulasi perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.3. Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja dengan Renstra

Indikator Kinerja	2014		2015		2016		s.d 2017		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tot. Real	Thd akhir Renstra	Tot. Real	Thd akhir Renstra	s.d 2016	Akhir Renstra
1	2	3	4	5	8	9	8	9	10	11
Persentase imum mukim mendapatkan pelatihan/sosialisasi LWN	27	32,65	59,4	59,4 %	-	-				
Jumlah aparatur Negara mendapatkan sosialisasi LWN			60	33,3 %	-	-				
Jumlah oplah tabloid Wali Nanggroe memuat tentang kegiatan LWN diedarkan dalam masyarakat	132.000	44.000	88.000	88.000	132.000	33,3%				
Jumlah majalah Wali Nanggroe memuat tentang	6.400	1.600	4.800	4.800	6.400	30,8%				



pembangunan kebudayaan Aceh didaftarkan dalam masyarakat										
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/online	5	5	20	32	37	37	7	100 %	75	100 %
Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)	10	10	50	68	99	52,11 %	45	72%	190	100 %

### 1.5) Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Penggunaan Sumberdaya

Publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa melibatkan pihak penyedia jasa media cetak (Koran/tabloid) dan elektronik (tv dan radio) pada momen momen penting, seperti pertemuan dengan Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri serta Duta Besar Negara-Negara Sahabat, sedangkan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media baliho milik Keurukon Katibul Wali yang berada dalam Kota Banda Aceh (depan kantor Gubernur Aceh), Ajun dan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar serta penayangan juga di kabupaten/Kota pada momen-momen penting melibatkan penyedia jasa percetakan.

### 1.6) Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan penunjang terwujudnya realisasi /pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis 4 ini, sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.4. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengetahuan / pemahaman masyarakat dan aparatur Negara tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/Kelembagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai dinul islam melalui kegiatan pelatihan/sosialisasi/publikasi/aktualisasi nilai-nilai luhur.	Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media massa	Program pengembangan nilai budaya. Kegiatan sosialisasi adat/adat istiadat melalui media massa dan elektronik
		Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media baliho	Program pengembangan nilai budaya. Kegiatan sosialisasi adat/adat istiadat melalui media massa dan elektronik

### 3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2017, Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh mendapat anggaran belanja sebesar Rp. 25.633.051.891,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.520.481.238,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 20.112.570.653,-, Anggaran untuk belanja Program dan Kegiatan yang menjadi urusan wajib bidang kebudayaan sebesar Rp. 1.372.820.000,-. Dimana pada Tahun Anggaran 2017 terjadi Perubahan Anggaran APBA pada SKPA.

Setelah adanya Perubahan Anggaran, maka Anggaran Belanja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh menjadi sebesar Rp. 25.526.051.891,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.520.481.238,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 20.005.570.653,-, dimana anggaran belanja Program dan Kegiatan untuk urusan wajib bidang kebudayaan sebesar Rp. 1.679.833.000,-.

Anggaran belanja setelah Perubahan tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.725.684.187,- atau 69,44 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 4.548.992.848,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 13.176.691.339,- dimana realisasi anggaran belanja program dan kegiatan untuk urusan wajib bidang kebudayaan sebesar Rp. 1.185.048.235,-.

Realisasi anggaran belanja untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun 2017 sesuai dengan program dan kegiatan penunjang terwujudnya realisasi/pencapaian kinerja dari sasaran strategis tersebut di atas dengan realisasinya sebagaimana tersebut dalam daftar realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2017.

Adapun realisasi anggaran belanja Keurukon Katibul wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun Anggaran 2017 dapat lihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Belanja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun Anggaran 2017

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>5.520.481.238,-</b>	<b>5.520.481.238,-</b>	<b>4.548.992.848,-</b>	<b>82,40</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>20.112.570.653,-</b>	<b>20.005.570.653,-</b>	<b>13.176.691.339,-</b>	<b>65,87</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12.441.992.653,-</b>	<b>9.025.160.653,-</b>	<b>7.030.087.208,-</b>	<b>77,89</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.700.000,-	6.700.000,-	2.126.050,-	31,73
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	672.850.000,-	777.850.000,-	538.509.319,-	69,23
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000,-	21.500.000,-	6.087.600,-	28,31
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	525.034.703,-	527.134.703,-	520.276.000,-	98,70
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.393.950,-	120.943.950,-	120.471.400,-	99,61
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.225.000,-	143.225.000,-	63.469.250,-	44,31
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,-	94.400.000,-	88.528.600,-	93,78
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	191.000.000,-	195.000.000,-	184.780.000,-	94,76
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	30.624.000,-	30.624.000,-	30.624.000,-	100,00
10	Penyediaan Makan dan Minum	853.500.000,-	892.500.000,-	568.620.669,-	63,71
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	977.010.000,-	977.010.000,-	856.570.757,-	87,67
12	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.933.155.000,-	5.238.273.000,-	4.050.023.563,-	77,32
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3.531.206.000,-</b>	<b>6.419.416.000,-</b>	<b>3.860.599.185,-</b>	<b>60,14</b>
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.748.666.000,-	1.975.916.000,-	1.408.629.000,-	71,29
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	428.000.000,-	2.326.805.000,-	676.674.000,-	29,08
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	861.500.000,-	861.500.000,-	595.803.232,-	69,16
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	493.040.000,-	1.255.195.000,-	1.179.492.953,-	93,97
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>1.548.410.000,-</b>	<b>1.594.610.000,-</b>	<b>373.825.616,-</b>	<b>23,44</b>
1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan	881.980.000,-	881.980.000,-	22.842.216,-	2,59
2	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	447.900.000,-	494.100.000,-	147.410.000,-	29,83
3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	218.530.000,-	218.530.000,-	203.573.400,-	93,16

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	
				Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>132.000.000,-</b>	<b>132.000.000,-</b>	<b>107.656.500,-</b>	<b>81,56</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	132.000.000,-	132.000.000,-	107.656.500	81,56
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>1.372.820.000,-</b>	<b>1.679.833.000,-</b>	<b>1.185.048.235,-</b>	<b>70,55</b>
1	Pemberian Penghargaan dan Kerjasama Dibidang Budaya	683.810.000,-	879.191.000,-	648.874.470	73,80
2	Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah Kuno	288.610.000,-	360.242.000,-	138.773.157	48,52
3	Sosialisasi Adat/adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik	400.400.000,-	440.400.000,-	367.246.008	83,39
4	Penyusunan Regulasi tentang Adat dan adat Istiadat	303.980.000,-	303.980.000,-	30.154.600	9,92
<b>VI</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>256.692.000,-</b>	<b>267.942.000,-</b>	<b>619.474.595,-</b>	<b>231,20</b>
1	Pengembangan data base sistem informasi lembaga, sejarah budaya/adat dan istiadat	256.692.000,-	267.942.000,-	242.850.000	90,64
2	Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi	301.150.000,-	358.309.000,-	276.366.220	77,13
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman Budaya	224.320.000,-	224.320.000,-	100.258.375	44,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>25.633.051.891,-</b>	<b>25.526.051.891,-</b>	<b>17.725.684.187,-</b>	<b>69,44,-</b>

Besarnya realisasi keuangan dan capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas akan menjadi catatan penting dalam rangka perbaikan dan peningkatan capaian kinerja kedepan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk Pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Rencana Strategis. Capaian Kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 ini berdasarkan Pengukuran Kinerja Tahun 2017 atas Penetapan Kinerja Tahun 2017. Semoga capaian kinerja mendatang diharapkan lebih meningkat dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

Disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, namun harapan kami dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKAP) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2017, semoga dimasa mendatang Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dalam penyajikan laporan ini akan lebih sempurna, transparan dan berakuntabilitas.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini disusun, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Banda Aceh, Februari 2018

KATIBUL WALI

**Drs. H. SYAIBA IBRAHIM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601201 198103 1 004

# LAMPIRAN

DAFTAR PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SKPA					
KEURUKON KATIBUL WALI / SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	1.1 Persentase Pemenuhan Pengisian Struktur Kelembagaan Wali Nanggroe : a. Majelis Hutan Aceh (MHA) b. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh (MKKA) c. Majelis Pertambangan dan Energi Aceh (MPEA) d. Majelis Ekonomi	26,70%	7 orang 7 orang  33 orang	tidak tercapai
2.	Meningkatkan jumlah naskah/manuskrip kuno terselamatkan/lestari dan terdokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe.	2.1 Jumlah Naskah/Manuskrip kuno yang dialih bahasa dari 16 naskah yang dipreservasi 2.2 Jumlah naskah/Manuskrip Kuno/ Khazanah Aceh yang di selamatkan dipreservasi	4 Naskah  10 naskah	4 Naskah (312 lbr)  10 naskah	1 Naskah  -
3.	Meningkatnya jumlah Reusam mengatur tatalaksanaan Lembaga Wali Nanggroe dan Penyelenggaraan Adat istiadat dalam kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam	3.1 Jumlah Reusam ditetapkan Lembaga Wali Nanggroe 3.2 Jumlah Rekomendasi/per- timbangan Wali Nanggroe	4 Reusam  7 Rekomendasi/ Pertimbangan	4 Reusam  7 Rekomendasi/ Pertimbangan	
4.	Meningkatnya pengetahuan/ pemahaman masyarakat tentang Kelembagaan Wali Nanggroe (LWN)/ kelembagaan adat, adat istiadat dan sejarah Aceh serta penghayatan nilai adat budaya Aceh berdasarkan nilai-nilai Dinul Islam melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi/publikasi.	3.1 Jumlah Aktualisasi Nilai-nilai Adat dan Adat Istiadat melalui media cetak dan elektronik a. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ ajakan Wali Nanggroe melalui media Elektronik/ online b. Jumlah tayangan publikasi himbauan/ajakan Wali Nanggroe melalui media Cetak (display/baliho)	  7 kali  45 kali	  7 kali  31 kali	  100%  70%

Program :	Anggaran
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 3.383.645.000,-
2. Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 1.068.818.613,-

Banda Aceh, 25 April 2016

GUBERNUR ACEH

KATIBUL WALI

**dr. H. ZAINI ABDULLAH**

**Drs. SUTRISNO, MM**

Paraf Para Kabag.				
Kabag. I	Kabag. II	Kabag. III	Kabag. IV	Kabag. V

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Wali Nanggroe.	1.1. Jumlah Majelis terbentuk dalam Lembaga Wali Nanggroe Aceh	7 Majelis
2.	Peningkatan jumlah naskah/manuskrip kuno terselamatkan/lestari dan terdokumentasikan pada Lembaga Wali Nanggroe.	2.1. Jumlah Naskah/Manuskrip kuno yang dialih bahasa dari 16 naskah yang <i>dipreservasi</i>	2 Naskah

Program :		Anggaran
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 2.959.565.000,-
2.	Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 177.285.000,-

Banda Aceh, 10 Oktoober 2016

GUBERNUR ACEH

KATIBUL WALI

**dr. H. ZAINI ABDULLAH**

**Ir. M. NAZAR**



